



Available online at journal.unhas.ac.id/index.php/HJS

HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)

Volume 3, Issue 2, 2021

P-ISSN: 2685-5348, E-ISSN: 2685-4333

BST sebagai Alternatif Penanganan Masalah Kelompok Miskin pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

(BST as an Alternative for Handling the Problem of the Poor during the Covid-19 Pandemic in Tamamaung Village, Panakkukang District, Makassar City)

Andi Ainun Juniarsi Nur¹, Muh. Iqbal Latief², Andi Haris^{3*}

¹ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. *Email: andiainun012@gmail.com*

² Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. *Email: muhilberkelana@gmail.com*

³ Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. *Email: aharis2000@yahoo.com*

ARTICLE INFO

How to Cite:

Nur, A. A., Latief, M. I., & Haris, A. (2021). BST sebagai Alternatif Penanganan Masalah Kelompok Miskin pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 3(2), 118-125.

Keywords:

Social Policy, Cash Social Assistance, Poor Group, Covid-19

Kata Kunci:

Kebijakan Sosial, Bantuan Sosial Tunai, Kelompok Miskin, Covid-19

ABSTRACT

This study aims to find out the implementation and utilization of the BST policy program against the poor groups affected by Covid-19 in Tamamaung Urban Village.

This research was conducted out for 2 months and was conducted from February 2021 to March 2021 in Tamamaung Urban Village, Panakkukang Sub-District, Makassar City.

This research uses descriptive qualitative research based on case study research with 6 subjects consisting of BST beneficiaries, urban village officials, and BST beneficiary families in Tamamaung Urban Village. Based on the research results, it was found that the implementation of BST in Tamamaung Subdistrict, Panakkukang Subdistrict, was not going well in general, it could be seen from the lack of socialization to the community so that they did not know about the procedure requirements and criteria for the people who received the BST. And data verification was not carried out because, using DTKS data from the Ministry of Social Affairs and the data used were no longer relevant to current conditions, as a result many poor people did not get BST. And also there is no fixed schedule for disbursement which results in the disbursement process not running properly. Meanwhile, the majority of BST utilization uses BST funds for basic needs, school supplies and business capital.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan pemanfaatan kebijakan program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap kelompok miskin terdampak Covid-19 di Kelurahan Tamamaung.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dan dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sebagai tempat berlangsungnya penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus dengan subyek penelitian adalah 6 orang yang terdiri dari penerima manfaat BST, aparat kelurahan, dan keluarga penerima manfaat BST di Kelurahan Tamamaung.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi BST di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang berjalan kurang baik secara umum dapat dilihat dari tidak dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BST tersebut. Serta verifikasi data tidak dilakukan karena, menggunakan data DTKS dari Kementerian Sosial dan data yang digunakan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, akibatnya banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BST. Dan juga tidak ada jadwal yang tetap dalam pencairan yang mengakibatkan proses pencairan tidak berjalan dengan semestinya. Sedangkan pemanfaatan BST mayoritas menggunakan dana BST untuk kebutuhan pokok, perlengkapan sekolah dan modal usaha.

1. PENDAHULUAN

Awal tahun 2020, dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang disebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan virus Corona. Kasus pertamanya dilaporkan di Wuhan, salah satu kota di China kemudian menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia (Kompas.com, 2020). Kasus pertama di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 maret 2020, walaupun beredar kabar bahwa sebelum itu Covid-19 telah masuk di Indonesia (detik.com, 2020).

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen, menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja (TNP2K, 2021).

Pemerintah selain melakukan kebijakan untuk penanganan medis, juga membuat membuat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Kementerian Keuangan RI, 2020). Kebijakan PEN diturunkan dalam berbagai program di antaranya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), program sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Pra- Kerja, Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Banpres Produktif UMKM, Subsidi Gaji, dan Diskon Listrik. Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini.

Dari berbagai bentuk bantuan tersebut, penulis fokus meneliti mengenai bantuan yakni BST untuk masyarakat di luar Jabodetabek selama pandemi yang mana nilai bantuannya sebesar Rp. 600.000 dan akan disalurkan selama 3 bulan dan sebesar Rp. 300.000 untuk bulan berikutnya. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

Penyaluran bantuan di Kelurahan Tamamaung sudah berjalan selama 9 bulan, para warga sudah merasakan efek dari bantuan tersebut. Akan tetapi, data yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, sebab pada umumnya data yang ada telah usang dan tidak relevan lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini. Bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan juga membutuhkan bantuan tersebut mengingat covid-19 memiliki dampak luas dibidang ekonomi.

Pemerintah membentuk program bantuan selama Covid-19 mempunyai tujuan yang ingin diraih. Untuk melihat indikator tercapainya tujuan dari program bansos tersebut dalam membantu masyarakat rentan yang terdampak Covid-19 dapat diukur melalui implementasi pelaksanaan program bansos tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan sehingga peneliti mengambil judul “BST Sebagai Alternatif Penanganan Masalah Kelompok Miskin Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam analisis data peneliti menggunakan reduksi, penyajian serta verifikasi data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- **Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST)**

1) Verifikasi Data BST

Verifikasi data untuk program BST menggunakan data DTKS dari Kementerian Sosial. Penerima BST di Kelurahan Tamamaung adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 352 rumah tangga, yang terdiri dari 3.340 rumah tangga miskin. Sedangkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia sebanyak 370 rumah tagga. Rumah tangga penerima BST di Kelurahan Tamamaung sebanyak 35,95% persen dari seluruh total rumah tangga. Dari seluruh KPM yang menerima dana BST. Data yang digunakan adalah data tahun 2010 yang selayaknya tidak dipakai karena tentunya kurang valid.

2) Pembagian Surat Pemberitahuan Pencairan BST

Kantor Pos menyerahkan surat pemberitahuan pencairan dana BST kepada pihak kelurahan melalui TKS kelurahan. Selanjutnya Lurah Tamamaung menyerahkan kepada Ketua RW, berikutnya Ketua RW menyerahkan kepada Ketua RT , terakhir Ketua RT menyerahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kenyataan di lapangan, penyerahan surat pemberitahuan dari Kantor Pos kepada Kepala Desa/Kelurahan bersamaan dengan penyerahan daftar KPM sebagaimana pengakuan Informan 4. Seharusnya penyerahan surat pemberitahuan kepada KPM diberikan paling lambat H-1 tetapi, biasanya penyerahan kepada KPM dilakukan di hari pengambilan. Sehingga banyak KPM yang telat melakukan pengambilan dana BST.

3) Pencairan Dana BST

a) Melalui Kantor POS

Pencairan dana BST dilakukan di Kantor Pos. Dalam pelaksanaannya cabang Kantor Pos kecamatan menjadi tempat pengambilan penerima BST untuk mencairkan dananya. Kantor Pos Kecamatan Panakkukang digunakan semua kelurahan, termasuk kelurahan Tamamaung. Lokasi pengambilan di Kantor Pos Jl. A.P. Pettarani.

Kantor Pos juga diharuskan untuk menyiapkan tenda-tenda, kursi-kursi, dan alat pengeras suara, serta memberi perlindungan khusus bagi kelompok rentan, terutama KPM yang sakit, ibu hamil, penyandang cacat dan lanjut usia dengan menerapkan protokol kesehatan.

Supaya keamanan proses pencairan terjamin, PT. Pos melibatkan aparat keamanan (polisi) selama pencairan dana dilakukan. Aparat keamanan ikut membantu PT. Pos selama proses pencairan berlangsung dengan cara melakukan penertiban protokol kesehatan terhadap KPM sebelum diserahkan kepada petugas pos.

Permasalahan yang timbul saat pencairan dana adalah ketidakkonsistenan Kantor Pos dengan peraturan yang telah mereka buat, yaitu tahap-tahap pengambilan dana BST, seringkali berubah-ubah tahapan yang harus dilewati KPM.

b) Melalui Transfer Bank BRI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi) dan mendorong keuangan inklusif. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Melalui penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial sehingga mudah dikontrol, dipantau dan mengurangi penyimpangan.

Untuk tahun 2021 berdasarkan informasi dari TSK Kelurahan Tamamaung sejak pencairan bulan januari, KPM yang menerima melalui bank BRI sudah tidak mendapatkan lagi. Untuk alasan tidak cairnya TSK belum mengetahui dari dinas sosial.

4) Ketepatan Sasaran

Hal yang menarik yang disampaikan TKS Kelurahan Tamamaung menyatakan program BST tersebut kurang/tidak tepat sasaran, bantuan bantuan tersebut belum menjangkau semua masyarakat yang rentan. Basis data yang digunakan dalam bantuan sosial hanya mencakup 40% masyarakat miskin (bdt.tnp2k.go.id). Ini berarti data masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 belum termasuk pekerja informal, pekerja yang di PHK, dan masyarakat UMKM.

Penyatuan data yang baik bukan saja mengintegrasikan dan mensinkronkannya, tetapi pembaharuan data sesuai dengan keadaan terkini dan laporan petugas di lapangan/daerah juga harus direspon dengan cepat dan tepat oleh pemerintah pusat.

Kesadaran mengembalikan bantuan sosial karena merasa mampu berdiri sendiri, dan memutuskan untuk keluar dari program bantuan, dengan alasan ada orang lain yang lebih berhak atas bantuan tersebut. Hal seperti ini tentu saja dapat terbangun melalui komunikasi yang baik antara masyarakat penerima bantuan dan para pendamping program.

• Pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Umumnya KPM menyatakan dana yang mereka terima cukup membantu meringankan ekonomi rumah tangga. Namun, mereka menilai jumlah dana tersebut kurang memadai. Hal ini terjadi karena mereka hanya membandingkan dana BST yang diterima dengan harga nominal berbagai kebutuhan, seperti beras dan bahan pokok lainnya sehingga yang tampak adalah nilai BST lebih rendah dibandingkan pengeluarannya. Apabila mengacu pada tujuan BST, yaitu memberikan stimulus agar

daya beli masyarakat meningkat yang diakibatkan pandemic Covid-19.

Mengenai pemanfaatan dana BST yang diterima masyarakat menurut beberapa keterangan dari perangkat sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan keperluan rumah tangga lainnya. Namun demikian, masih ada kasus dana BST yang diterima oleh KPM tidak digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Mayoritas PM menggunakan dana BST untuk konsumsi, membeli data internet, perlengkapan sekolah dan modal usaha. Karena pencairan BST tahap pertama berdekatan dengan lebaran, sebagian besar penerima menggunakannya untuk membeli pakaian. Di sisi lain, KPM menggunakan dana BST untuk membeli perlengkapan sekolah. Tampaknya hal ini terjadi karena jadwal pencairan BST tahap pertama di sebagian daerah jatuh pada bulan Juli dan Agustus yang merupakan momen tahun ajaran baru.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan studi dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

- 1) Verifikasi data untuk program BST tidak dilakukan karena, menggunakan data DTKS dari Kementerian Sosial dan data yang digunakan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.
- 2) Tidak ada jadwal yang tetap dalam pencairan yang mengakibatkan efek berantai, juga mengakibatkan proses pencairan tidak berjalan semestinya.
- 3) Masih terjadi kesalahan penetapan sasaran dan ketidaktercakupannya penerima BST karena verifikasi tidak berjalan dengan semestinya.
- 4) Pemanfaatan BST mayoritas menggunakan dana BST untuk konsumsi, membeli data internet, perlengkapan sekolah dan modal usaha.

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlanjutan program ini mensyaratkan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal verifikasi data dana BST dan ketepatan sasaran program BST. Berikut ini beberapa saran perbaikan yang harus dilakukan:

- 1) Proses verifikasi data harus dilaksanakan di semua desa/kelurahan, karena tujuan verifikasi data adalah untuk memperbaiki *database* RTS. Data tersebut dapat digunakan tidak hanya untuk BST, tapi juga bisa digunakan untuk program intervensi kemiskinan lainnya.
- 2) Pembaharuan data DTKS oleh Kementerian Sosial yang melibatkan semua *stakeholder* yang ada.
- 3) Sebaiknya diadakan evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan memutuskan program akan dilanjutkan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Komariah dan Djam'an Satori. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Agus Salim. (2002). *Perubahan sosial*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya.
- Bessant, Judith; Watts, Rob; Dalton, Tony; Smith, Paul. (2006). *Talking Policy: How social Policy in Made*. Crows Nest: Allen and Unwin.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia.
- Cheyne, Christine, Mike O'Brien and Michael Belgrave. (1998). *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*. Auckland, Oxford University Press.
- Conyers, Diana, (1992). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. Terjemahan Susetiawan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Fadli, Rizal. (2020). Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 melalui: <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>.
- Huttman, Elizabeth Dickerson. (1982). *Introduction to Social Policy*. New York: McGraw-Hill.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Izzati Al, Ridho. (2020). *Estimasi Dampak Pandemi COVID-19 pada Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Mari Bersama-sama Menggerakkan Roda Perekonomian Untuk Indonesia Lebih Baik*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/k-anwil-sumseljambibabel/baca-artikel/13298/Melalui-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-Mari-Bersama-sama-Menggerakkan-Roda-Perekonomian-Untuk-Indonesia-Lebih-Baik.html>. 1 Oktober 2020.
- Kementerian Sosial, BPS. (2020). *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2011*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Marshall, T.H. (1981). *The Right to Welfare*. London: Heinemann.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Bisri dan Maharani, Eilsa. (2010). *Kamus Lengkap Sosiologi*. Yogyakarta: Panji Pustaka.

- Rein, Martin. (1983). *From Policy to Practice*. London: Macmillan.
- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedjatmoko. (1980). *Kesadaran Sejarah dan Pembangunan*. Jakarta: Arsip Nasional.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto Edi. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto Edi. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryahadi, Asep et al. (2020). The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. SMERU. Working Paper. The SMERU Research Institute: Jakarta.
- Suyanto, Bagong. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-Trans Publishing.
- World Health Organization (2020). *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*. Diakses melalui: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.